

I

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007

Tanggapan PLN soal Tagihan Rekening

MENJAWAB surat pembaca pada *Harian Media Indonesia* (16/6) yang disampaikan Bapak Asep Supriatna, Jalan Kramat II No 60A Jakarta Pusat, yang berjudul *Tagihan Rekening PLN tidak Sesuai Kenyataan*, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

Pertama-tama PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan pembayaran rekening listrik yang Bapak Asep alami.

Sebagai informasi, keluhan pelanggan tersebut terjadi karena nilai rekening yang ada di informasi sebesar Rp1.171.885, sedangkan di loket sebesar Rp1.284.705, sehingga terdapat selisih sebesar Rp112.850.

Perbedaan besarnya tagihan rekening listrik antara informasi rekening (*invoice*) dan loket bank, terjadi karena data yang ada pada informasi rekening dan pada loket bank sampai pada 6 Juni 2007 merupakan data pelanggan golongan tarif rumah tangga 3 (R3) yang

belum dikenakan PPN.

Menyadari ada kekeliruan tersebut, Area Pelayanan Menteng pada 6 Juni 2007, langsung diproses kembali dengan menambahkan biaya tarif PPN. Kemudian, data tanpa PPN ditarik dan diganti dengan data yang telah dikenakan PPN.

Bagi pelanggan R3 yang telah mendapat informasi melalui internet atau *invoice*, akan menemukan bahwa data di loket akan lebih besar daripada data yang telah diterima sebelumnya (karena belum termasuk PPN).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas pengertian pelanggan.

Kepada redaksi yang telah memuat penjelasan ini, kami ucapkan terima kasih.

IR AZWAR LUBIS
Deputi Manajer Komunikasi dan
Bina Lingkungan
PT PLN Distribusi Jakarta Raya
dan Tangerang

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2007

Pemkot Siap Bayar Listrik Pendopo

PEMKOT Bandung siap membayar kewajiban atas tagihan pajak penerangan jalan (PPJ) Pendopo Kota Bandung. Namun hingga saat ini, Pemkot Bandung belum menerima surat resmi dari Pemkab Bandung maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengenai itu. Sekdakot Bandung Edi Siswadi mengatakan hal itu sesuai rapat koordinasi tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di Ruang Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (6/7). Edi mengatakan, ia baru mengetahui dari media massa jika selama ini PPJU Pendopo Kota Bandung dibayar oleh warga Kab. Bandung. "Kami bisa perbaiki dan luruskan hal itu. Kami selama ini tidak tahu bahwa yang bayar masih warga Kabupaten Bandung," katanya. Untuk itu, saat ini pemkot menunggu surat resmi dari PLN yang mengatur kewajiban pembayaran PPJ. "Tidak akan terlalu sulit untuk koordinasi, tapi saya belum terima surat dari Pemkab Bandung maupun PLN. Pokoknya kami siap membayarnya," ujarnya. (A-156)***

2

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

Penjaminan Proyek 10.000 MW Tak Masalah

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, penjaminan dalam proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt (MW) tidak ada masalah. Dan yang ada hanya perbedaan penafsiran saja. "Soal penjaminan itu perbedaan penafsiran saja. Sebenarnya pada intinya materialnya sama, karena itu harus berunding lagi," kata Wapres usai salat Jumat, di Jakarta.

Menurut Wapres, pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW merupakan suatu keharusan dan mutlak harus dilakukan, karena Indonesia saat ini mengalami kekurangan energi listrik. "Kalau tidak ditambah 10.000 MW akan terjadi kekurangan listrik dan kita tiap tahun akan menambah subsidi ke PLN untuk kebutuhan BBM," kata Wapres. (M Kardeni)

3

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2007

BUSINESS TALK

Krisis Bukan Berarti Bangkrut

"Walau krisis bukan berarti PLN bangkrut. Hanya saja kita perlu waktu untuk membangun pembangkit baru," kata Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN, Sunggu Anwar Aritonang di Medan, kemarin, menanggapi kabar krisis listrik yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir. ●

4

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007

Wapres:

Tak Ada Masalah Penjaminan Proyek Listrik 10.000 MW

[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada persoalan dalam program listrik 10.000 megawatt. Yang tersisa hanya masalah rumusan kata-kata dalam penjaminan antara Tiongkok dengan Indonesia. Indonesia menginginkan rumusan penjaminnya sesuai dengan aturan, tetapi Tiongkok menginginkan jaminannya dapat diterima sesuai dengan Bank Tiongkok.

"Kita ingin menambah 10.000 megawatt itu karena kebutuhan kita naik akibat investasi, ekonomi naik. Jadi mutlak 10.000 megawatt itu. Kalau tidak, akan terjadi kekurangan listrik dan kita tiap tahun akan menyubsidi PLN akibat ke-

kurang listrik itu. Jadi kita tambah 10.000 megawatt itu mutlak dan sudah merupakan keputusan pemerintah. Tapi kita tidak punya dana, karena itu kita kredit ekspor. Yang beda tinggal *warning*-nya. Tidak ada perbedaan prinsip. Pemerintah menjamin tapi dengan kata-kata sesuai aturan. Cina meminta yang dapat diterima sesuai Bank Cina. Jadi sekarang berbeda tinggal *warning*. Jadi sekarang *warning* itu yang saya minta dua minggu harus diselesaikan bersama-sama. Karena harus dijamin, kalau tidak, beginilah negeri ini mati lampu, mati lampu," ujar Kalla kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/7).

Proyek ini dijamin oleh pemerintah, meskipun

akan tetap dibayar PLN. Sedangkan terkait dana penjamin, tidak akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). "Mau masuk APBN-P bagaimana? Itu kan masuk jaminan. Justru yang masuk APBN-P itu subsidi yang besar Rp 30 triliun. Jaminan tidak masuk APBN-P," ucap Kalla.

Menjawab wartawan, Kalla menjelaskan bahwa ketika proyek ini berjalan dalam arti sudah mulai mencicil, dengan sendirinya mengurangi subsidi sebesar Rp 80 triliun. Kalau tidak ada proyek itu, maka setiap tahun, Rp 30 triliun dana APBN dipakai untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). [A-21]

8

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2007

Saatnya Pemda Memberdayakan Listrik

Di tengah riuh rendahnya persoalan kelistrikan di Tanah Air, seperti kekurangan daya, pemadaman bergilir, dan pertumbuhan listrik yang tinggi, ada satu persoalan yang kurang terangkat di permukaan. Seperti diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, masalah itu terkait dengan elektrifikasi yang belum menyentuh daerah-daerah terisolasi. Sejumlah daerah di Indonesia masih tergolong terisolasi termasuk dari sisi penyediaan tenaga listrik.

Salah satu faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya industri wisata di Kabupaten Kerinci, Sumatra Barat, misalnya, adalah suplai listrik. Kerinci bersama Pulau Mentawai masuk dalam kategori daerah *isolated*, dalam pengertian PLN, itu adalah daerah yang tidak termasuk dalam jaringan interkoneksi Sumatra.

Untuk menjaga suplai listrik di kedua wilayah itu, PLN harus menggunakan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Karena penggunaan BBM inilah setiap bulannya PLN harus defisit operasi yang cukup besar. "Rata-rata kami defisit sekitar Rp 6,5 Milyar setiap bulan," kata Manager PLN Ranting Sungai Penuh, Purnawarman, di Jakarta, pekan ini.

General Manager PLN Wilayah Sumatra Barat, Sudirman, mengakui beban defisit operasional itu memang cukup berat. Namun demikian, paparnya, harus tetap dijalankan karena sesuai Undang-Undang, PLN adalah BUMN yang melayani *public service obligation* (PSO).

Saat ini, untuk Wilayah Sumatra Barat rasio elektrifikasi baru mencapai 56,76 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dari rasio elektrifikasi nasional yang baru mencapai 54 persen. Namun begitu, ada beberapa daerah yang masih sangat rendah rasio elektrifikasinya, yakni Mentawai baru 18,72 persen, Pasaman 37,37 persen,

persen.

Jika dilihat dari desa yang sudah terlistriki, maka jumlahnya lumayan tinggi, yakni 89,38 persen. Sementara Kepala Keluarga (KK) yang belum terlistriki mencapai 357.328 KK. Artinya, untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020, mereka harus memasang sambungan baru rata-rata 27.500 KK per tahun. Sementara untuk desa sebanyak 17 desa baru per tahun.

Peran Pemda

Sudirman menyadari kerja besar itu tidak bisa sepenuhnya hanya dipikul oleh PLN sendiri. Komitmen dan kerjasama dari pemerintah daerah untuk mewujudkan semua niat luhur itu sangat dibutuhkan. "Karena itu kami memberdayakan Pemda-Pemda untuk sama-sama membangun," tegasnya.

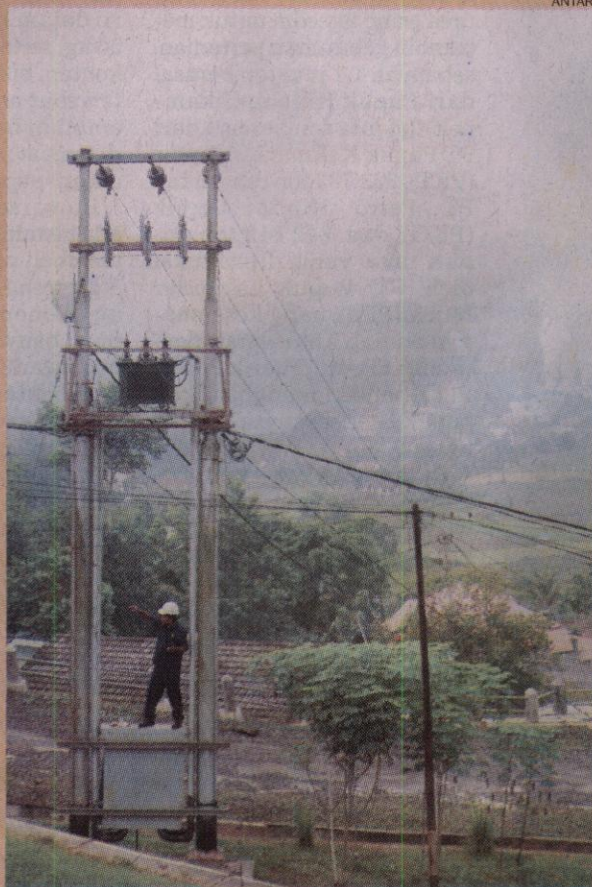
Sejauh ini sambutan dari Pemda di daerah kerja PLN Wilayah Sumbar cukup baik. Sebagai contoh, untuk Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menyediakan dana sebesar Rp 800 juta untuk membangun jaringan listrik tegangan menengah dan jaringan rendah, termasuk pembangunan travo. Dengan dana tersebut, sejumlah warga mulai dapat menikmati aliran listrik. Salah satu contohnya adalah warga Sungai Salak.

Menurut Manager PLN Ranting Painan, Syair Rasyid, Pemda Pessel menyediakan dana untuk jaringan distribusi listrik melalui dana hibah yang telah dianggarkan dalam APBD. Komitmen yang sama juga ditunjukkan oleh Pemda Tanah Datar yang menyediakan dana sebesar Rp 800 juta. Sementara, Pemda Kerinci telah menyisihkan dana Rp 600 juta untuk kepentingan jaringan listrik untuk rakyat.

Partisipasi Pemda bukan hanya berupa bantuan pembangunan jaringan. Pada tahun 2004-2005, Pemda Sawah Lunto membagi-bagikan genset kepada sejumlah daerah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Genset tersebut dioperasikan oleh warga setempat atau koperasi. Namun karena pemeliharaannya kurang baik, akhirnya banyak yang rusak.

Melihat medan kerja PLN Wilayah Sumatra Barat, memang tidak semuanya dapat dijangkau dengan jaringan interkoneksi Sumatera. Karena itu, selain pembangunan sejumlah PLTU dan Gardu Induk, maka PLN juga akan mendorong dan mendukung sepenuhnya niat sejumlah Pemda yang berencana membangun sejumlah Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) yang mengandalkan tenaga air. Sebab di wilayah ini banyak potensi alam yang dapat dimanfaatkan.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri akan membantu unit pembangkit listrik untuk warga yang berada di desa-desa pelosok yang belum mendapat



PERIKSA: Seorang netugas PLN sedang memeriksa jaringan

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2007

Tunggakan Dibayar STS Menyala Lagi

PURWAKARTA, (PR).-

Setelah aliran listrik ke STS (Sadang Terminal Square) pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Purwakarta diputus oleh PT PLN AJP Purwakarta, pengelola mal tersebut akhirnya memenuhi kewajibannya membayar tunggakan listrik Rp 115 juta, Kamis (5/7). Kini, aliran listrik ke pusat perbelanjaan itu dihidupkan kembali.

Humas PT PLN AJP Purwakarta, Drajat Nugraha ketika dihubungi "PR", Jumat (6/7), membenarkan bahwa PT STS telah membayarkan tunggakan listriknya kurang lebih Rp 115 juta untuk tagihan Juni 2007.

Menurut dia, sebelum aliran listrik diputuskan, PT PLN sudah memberikan toleransi kepada PT STS untuk membayarkan tunggakan listrik Juni tapi setelah lewat akhir Juni belum juga diselesaikan, maka Senin (2/7) aliran listrik ke PT STS diputus total.

Dijelaskan, kebijakan pemutusan aliran listrik oleh PT PLN tidak hanya kepada PT STS saja, melainkan kepada konsumen lainnya yang tidak memenuhi kewajibannya akan diperlakukan sama. "Sebelum melakukan pemutusan sambungan, PT PLN AJP Purwakarta akan memberikan toleransi, tapi kalau sudah lewat belum juga dipenuhi maka terpaksa kami putus aliran listriknya," kata Drajat.

Seperti diberitakan harian ini, karena menunggak pembayaran listrik selama satu bulan, aliran listrik ke Sadang Terminal Square diputus PT PLN AJP Purwakarta.

"Ya sejak 2 Juli, aliran listrik ke STS sementara dicabut karena mereka belum memenuhi kewajibannya, Kami sudah memberikan toleransi hingga akhir bulan tapi mereka belum juga membayar," kata Kepala PLN AJP Purwakarta, Ir. Indra Sofnil (A-86)

7